

**INTERVENSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN  
MASYARAKAT  
(Studi di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menperoleh Gelar Sarjana  
ADMINISTRASI PUBLIK



**Oleh:  
Yosafat Maradona  
2014210163**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

Desa ialah unit pemerintahan yang sangat terkecil dalam tatanan pemerintahan yang terdapat dalam Negara kesatuan republic Indonesia serta langsung tersambung dengan warga. Penyelenggaraan pemerintahan Desa bersumber pada UU republic Indonesia tahun 2014 nomor 6 pasal 2 tentang Desa. Desa diberikan peluang buat mengendalikan serta mengurus rumahnya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan ialah dengan mencermati prinsip demokrasi, kedudukan dan warga, pemerataan, keadilan, dan mencermati kemampuan dan keanekaragaman wilayah( peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005). Pembinaan yakni upaya pemberdayaan warga lewat pelatihan yang di adakan oleh pemerintah Desa, pemberdayaan warga tidak cuma meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, namun pula harkat serta martabat. Memberdayakan warga meliputi aspek Enabling serta Empowering. Enabling ialah upaya menghasilkan atmosfer ataupun hawa yang membolehkan kemampuan warga tumbuh. Empowering ialah upaya meningkatkan kemampuan ataupun energi yang dipunyai warga. Upaya yang amat pokok dalam pemberdayaan warga ialah kenaikan taraf pembelajaran, serta derajat kesehatan, dan akses ke dalam sumber sumber kemajuan ekonomi semacam modal, teknologi, data, lapangan kerja serta pasar. Intervensi pemerintah lewat pengembangan kapasitas warga menggambarkan wujud dari upaya pengembangan pengetahuan, perilaku serta keterampilan warga supaya bisa berfungsi dan aktif melaksanakan pembangunan secara mandiri serta berkepanjangan. Tata cara riset yang digunakan pada riset ini yakni metode kualitatif, posisi riset Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kata Kunci: Intervensi, Pemerintah Desa, Pembinaan Warga.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar belakang**

pemerintahan yang sangat terkecil ialah Desa dalam tatanan pemerintahan yang terdapat dalam Negara kesatuan republik Indonesia serta langsung tersambung dengan warga. Penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan UU Republik Indonesia Tahun 2014 No 6 pasal 2 tentang Desa. Pengaturannya bersumber pada keragaman pemikiran, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi serta pemberdayaan warga. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa ialah subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan buat mengendalikan serta mengurus kepentingan warga( Hikmah Muhaimin. 2018: 80).

Desa diberikan peluang buat mengendalikan serta mengurus rumahnya sendiri, yang diamanatkan dengan persyaratan ialah dengan mencermati prinsip-prinsip dalam demokrasi, kedudukan dan warga, pemerataan, keadilan, dan mencermati kemampuan serta keanekaragaman wilayah( Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Berikutnya UU Tahun 2014 No 6 tentang Desa pasal 1, yang melaporkan kalau pembangunan desa bertujuan tingkatkan kesejahteraan warga desa, serta mutu hidup warga dan penanggulangan kemiskinan lewat pemenuhan kebutuhan bawah, pembangunan fasilitas serta prasarana desa, pengembangan serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat setempat, dan pemanfaatan sumber energi alam serta area secara berkepanjangan( Jefri S. Pakaya. 2016: 78).

Pastinya pembangunan pedesaan sepatutnya menuju pada kenaikan kesejahteraan warga pedesaan lewat pemberdayaan warga desa. Pemberdayaan warga berupaya buat tingkatkan mutu sumber energi manusia( SDM) paling utama dalam membentuk serta merubah sikap warga buat menggapai kehidupan yang lebih baik serta taraf hidup yang lebih bermutu( Hikmah Muhaimin. 2018: 81). Ditambahkan oleh Sumbi serta Firdausi( 2016: 41) kalau pembangunan berbasis warga diketahui selaku konsep pembangunan yang lebih membuka ruang buat

warga supaya bisa ikut serta dalam proses pembangunan sehingga pembangunan bisa mengacu dengan kebutuhan dengan menggunakan kemampuan yang terdapat demi revisi mutu hidup warga.

Pembangunan desa bersumber pada UU Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa pasal 78 mempunyai sebagian sesi, ialah perencanaan, penerapan, serta pengawasan. Pembangunan desa sebagaimana diartikan pada ayat( 2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial. Pembangunan desa hendak sukses baik apabila didukung oleh partisipasi segala masyarakat warga serta optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh gimana guna yang dijalankan oleh pihak pemerintah selaku koordinator penerapan pembangunan. Dalam perihal ini pemerintah wajib sanggup mengkoordinasikan bermacam unit dalam pemerintahan supaya bisa mendayagunakan guna mereka dengan baik serta membagikan donasi yang nyata untuk proses pembangunan( Ra' is, 2017: 36- 41).

Pembangunan pedesaan bisa dilihat selaku upaya memeratakan pembangunan pedesaan lewat penyediaan fasilitas serta prasarana buat memberdayakan warga serta upaya memusatkan pembangunan ekonomi wilayah yang efisien serta kuat. Pemberdayaan ialah upaya buat membangun kemampuan warga, dengan mendesak atau memaksa, memotivasi, membangkitkan semangat dengan cara memberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai kemampuan serta berupaya buat meningkatkan kemampuan itu jadi aksi nyata. Pemberdayaan warga pada dasarnya ialah proses buat membuat warga jadi berdaya( Muhaimin, 2018: 73).

Pemberdayaan warga tidak cuma meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, namun pula harkat serta martabat, rasa yakin diri serta harga dirinya, tatanan dan nilai budaya setempat terpelihara. Memberdayakan warga meliputi aspek enabling serta empowering. Enabling ialah upaya menghasilkan suasana ataupun iklim yang membolehkan kemampuan warga tumbuh. Bawah enabling kalau tiap manusia, tiap warga, mempunyai kemampuan yang bisa dibesarkan. Maksudnya, tidak terdapat warga yang sama sekali tanpa energi, sehingga butuh upaya buat

memberdayakan potensinya( Sumbi serta Firdausi, 2016: 42- 44; Dewi R Indrawati, 2016: 176- 178).

Empowering ialah upaya meningkatkan kemampuan ataupun energi yang dipunyai warga. Dalam rangka memperkuat kemampuan, dibutuhkan langkah-langkah lebih konkrit, tidak hanya dari cuma menghasilkan hawa serta atmosfer. Penguatan meliputi penyediaan bermacam masukan( input), dan pembukaan akses ke dalam bermacam kesempatan( opportunities) yang hendak membuat warga jadi berdaya( Iskandar, I. Resmawan, E Serta L. Dynastar. 2018).

Upaya yang amat pokok dalam pemberdayaan warga ialah kenaikan taraf pembelajaran, serta derajat kesehatan, dan akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi semacam modal, lapangan kerja, serta pasar. memberdayakan warga bisa lewat sebagian program- program pemberdayaan ialah: awal pengaktifan kelembagaan, kedua kenaikan kedudukan dan warga, pembangunan raga, serta kenaikan ekonomi produktif dengan aktivitas pemberian pelatihan. Oleh karena itu, partisipasi warga amat berarti paling utama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri serta masyarakatnya( Muhaimin, 2018: 78, 79)

Tiap anggota warga dalam suatu komunitas sesungguhnya mempunyai kemampuan, gagasan dan keahlian buat bawa dirinya serta komunitasnya buat mengarah ke arah yang lebih baik. Tetapi, kemampuan itu terkadang tidak dapat tumbuh diakibatkan faktor- faktor tertentu. Buat menggerakkan kembali kemandirian warga dalam pembangunan di komunitasnya, hingga dibutuhkan dorongan- dorongan ataupun gagasan dini buat menyadarkan kembali kedudukan serta letaknya dalam kerangka buat membangun warga madani. Proses penyadaran warga selaku bagian dari intervensi pemerintah lewat konsep- konsep pengembangan kapasitas( Takalawangen, Meter. Mantiri, Meter Serta D. Monintja 2- 11).

Intervensi pemerintah lewat pengembangan kapasitas warga ialah wujud dari upaya pengembangan pengetahuan, perilaku serta keahlian warga supaya bisa berfungsi dan aktif melaksanakan pembangunan secara mandiri serta berkepanjangan. Tidak hanya itu, intervensi yang dicoba pemerintah dalam perihal ini pemerintah desa ialah dengan pembangunan prasarana serta fasilitas bawah raga,

semacam irigasi, jalur, listrik, ataupun sosial semacam sekolah serta sarana pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau( Muhaimin, 2018: 79).

Hasil riset Sumbi serta Firdausi( 2017: 44) menampilkan kalau pemahaman warga guna ikut serta aktif dalam tiap proses pembangunan berbasis warga telah baik ditunjang budaya gotong royong masih kental. Upaya tingkatkan mutu manusia lewat aspek Pembelajaran resmi serta nonformal dan kesehatan. Berikutnya riset dengan fokus pemberdayaan warga oleh Miradj serta Sumarno( 2014: 107) nampak kalau proses pemberdayaan yang dicoba lembaga pembelajaran nonformal belum cocok harapan masyarakat belajar yang ikut serta dalam proses tersebut, serta hasil yang ditimbulkan pasca menjajaki proses pemberdayaan di lembaga- lembaga pembelajaran nonformal belum menolong warga miskin tingkatkan kehidupannya.

Bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba oleh( Muhaimin, 2018: 81) disimpulkan kalau pemerintah desa sanggup memberdayakan warga lewat sebagian program- program pemberdayaan ialah pembinaan, pelayanan, serta pengembangan terhadap warga, Pembinaan kepada warga lewat aktivitas keagamaan, aktivitas sosial budaya serta pelayanan kesehatan, pelayanan warga mencakup pelayanan di bidang pertanian, kesehatan serta perekonomian, Hendak namun dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan warga, pemerintah desa masih hadapi kendala- kendala antara lain partisipasi warga yang kurang, budaya malas dan minimnya sarana yang ada dalam menunjang aktivitas pemberdayaan. Bersumber pada kasus yang terdapat hingga penulis tertarik buat melaksanakan riset dengan judul“ Intervensi Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Warga”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah Intervensi pemerintah desa dalam pembinaan warga di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
- 2) Apa aspek pendukung serta penghambat Intervensi pemerintah desa dalam pembinaan warga di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Terdapat sebagian tujuan dalam riset ini ialah antara lain:

- 1) Buat mengenali intervensi pemerintah desa dalam memberdayakan warga di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- 2) Buat mengenali aspek pendukung serta penghambat intervensi pemerintah desa dalam memberdayakan warga di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### **1.4. Khasiat Penelitian**

Dari hasil yang hendak dicapai pada dikala penerapan aktivitas riset ini, diharapkan bisa membagikan khasiat selaku berikut:

- 1) Secara akademik, hasil riset yang dicapai bisa dijadikan bahan riset berikutnya serta hendak jadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam memenuhi kajian- kajian yang menuju pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut intervensi pemerintah desa dalam pemberdayaan warga Desa Sumbersekar.
- 2) Secara instan, hasil riset yang dicapai ini jadi bahan masukan untuk pemerintah desa dalam melaksanakan usaha mengentaskan faktor penghambat serta mengoptimalkan aspek pendukung pemberdayaan warga Desa Sumbersekar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.
- Ife, Jim. 2008. *Community Development*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 2009. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Djambangan. Jakarta: Longman.
- Moleong. L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andrianto. N. 2007. *Transparansi Adan Akuntabilitas Public Melalui e-government*. Malang : Bayumedia Publishing